

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk merekomendasikan alternatif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang paling sesuai untuk produk menstruasi ramah lingkungan. Saat ini untuk produk menstruasi, baik yang konvensional maupun ramah lingkungan, masih diperlakukan sama dari segi pengenaan PPN. Hal ini membuat konsumen lebih cenderung memilih produk konvensional yang lebih murah, tetapi mengakibatkan timbunan sampah yang tidak dapat didaur ulang yang meningkatkan risiko kerusakan lingkungan serta menambah beban pengelolaan sampah yang ditanggung pemerintah. Identifikasi alternatif dilakukan melalui wawancara dilakukan kepada pihak penyusun kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, akademisi, serta produsen produk menstruasi ramah lingkungan. Data selanjutnya diolah menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA). Hasil analisis menunjukkan bahwa dari empat alternatif yang diidentifikasi (pengenaan normal, PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut, dan PPN dengan besaran tertentu), fasilitas PPN tidak dipungut merupakan alternatif pengenaan PPN yang paling baik karena memberikan manfaat yang paling besar bagi masyarakat maupun industri. Namun demikian, implementasinya harus dilakukan sedemikian rupa dan disertai dengan pengawasan yang optimal agar tujuannya dapat dicapai. Selain itu, mengingat dampaknya terhadap lingkungan, pemerintah juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, agar para perempuan mau beralih menggunakan produk menstruasi ramah lingkungan.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, produk menstruasi ramah lingkungan, regulatory impact analysis

Abstract

This study aims to recommend the most suitable VAT imposition alternative for sustainable menstrual products. Currently, menstrual products, both conventional and sustainable, are still treated the same in terms of VAT imposition. This makes consumers more likely to choose cheaper conventional products, but generates non-recyclable waste pile that increases the risk of environmental damage and the burden of waste management borne by the government. Alternative identification was conducted through interviews with policy makers from Directorate General of Taxes, Fiscal Policy Agency, Ministry of Environment and Forestry, academics, and manufacturers of sustainable menstrual products. The data was then processed using Regulatory Impact Analysis (RIA). The results of the analysis show that of the four alternatives identified (normal tariff imposition, VAT exemption, VAT not collected, and VAT with a certain amount), the VAT not collected facility is the best alternative for VAT imposition because it provides the greatest benefit to the consumers and industry. However, its implementation must be carried out in such a way and accompanied by optimal supervision so that its objectives can be achieved. In addition, considering its impact on the environment, the government also needs to increase collaboration with various parties, so that women are willing to switch to using sustainable menstrual products.

Keywords: regulatory impact analysis, sustainable menstrual product, value added tax